

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Organisasi yang dipimpinnya.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan laporan ini realisasi Pendapatan adalah nihil, sedangkan realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 1.427.661.690,00 atau 96,49 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.479.541.900,00
2. Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,- serta nilai Beban-LO adalah sebesar Rp. 4.427.661.690,00

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diinformasikan bahwa nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 158.741.088,33
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp. 57.596.500,00 serta nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 57.596.500,00
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang profil organisasi, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
.....	
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	iv
.....	
Pernyataan Tanggung Jawab	v
.....	
Ringkasan.....	1
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	4
.....	
Laporan Operasional (LO)	5
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	6
Neraca	7
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	9
Bab I Pendahuluan	9
A Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	9
B Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	10
C Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	11
Bab II Profil organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.....	13
A Profil organisasi.....	13
B Kebijakan keuangan	15
C Indikator pencapaian target kinerja APBD.....	17
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	23
A Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.....	23
B Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	24
Bab IV Kebijakan Akuntansi	25
A Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	25
B Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	25
C Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	27
D Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	46
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan	47
A Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan	47
1. Pendapatan	47
2. Belanja	47
3. Beban	50
4. Aset	57
5. Kewajiban	63
5 Ekuitas Dana	63
6 Perubahan Ekuitas	63
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	65
A Pengungkapan penting Lainnya	65
B Rekening pemerintah	65
Bab VII Penutup	66
Daftar Lampiran	67

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan

1. Pendapatan	a. Pendapatan Asli Daerah
2. Belanja	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang dan Jasa
3. Beban	1) Beban Pegawai
	2) Beban Persediaan
	3) Beban Jasa
	4) Beban Pemeliharaan
	5) Beban Perjalanan Dinas
	6) Beban Penyusutan
3. Aset	a. Aset Lancar
	1) Kas di Bendahara Penerimaan
	2) Kas di Bendahara Pengeluaran
	3) Piutang Lain-lain
	4) Persediaan
	b. Aset Tetap
	1) Tanah
	2) Peralatan dan Mesin
	3) Gedung dan Bangunan
	4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
	5) Aset Tetap Lainnya
	6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
	7) Akumulasi Penyusutan
	c. Aset Lainnya
a. Kewajiban	a. Kewajiban Jangka Pendek
	b. Kewajiban Jangka Panjang
b. Ekuitas Dana	a. Ekuitas Dana Lancar
7. Perubahan Ekuitas	a. Belanja Pegawai
	b. Surplus/Defisit LO
	c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
	d. Ekuitas Akhir

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun Anggaran 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja selama periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan adalah nihil, dianggarkan sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.140.199.601,00 atau 99.22% dari anggarannya sebesar Rp. 1.149.183.932,25

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2020	ANGGARAN	REALISASI PER 30 DESEMBER 2019
PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA	1,149,183,932.25	1,140,199,601.00	3,346,000,000.00	2,978,787,310.00

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional. Pendapatan LO untuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah nihil, jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.427.661.690,00 meliputi beban pegawai sebesar Rp. 86.400.000,00 beban persediaan sebesar Rp 163,789,000.00,- beban jasa sebesar Rp. 63,964,500.00,- beban perjalanan dinas sebesar Rp. 371,029,981.00 serta beban penyusutan dan amortisasi Rp. 174.356.112,00 sehingga terdapat deficit dari operasional senilai Rp. (1.314.555.713,00)

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Perubahan Ekuitas adalah ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp. 332,208,520.33,- ditambah deficit anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (1.314.555.713,00) ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.444.340,00 ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 1.140.199.601,00 sehingga ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 158.296.743,33

4. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 158,296,748.33 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 0.00,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 35,130,165.00,-Aset Lainnya sebesar Rp. 123,166,583.33

Sementara itu jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 158,296,748.33 terdiri dari Kewajiban sebesarRp. 0.00,- dan Ekuitas sebesar Rp. 158,296,748.33

Ringkasan neraca per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2020	PER 31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
ASET			
- Aset lancar	0,00	0,00	0,00
- Aset tetap	35.130.165,00	114.332.937,00	(79.202.772,00)
- Aset lainnya	123.166.583,33	217.875.583,33	(94.709.000,00)
JUMLAH ASET	158.296.748,33	332.208.520,33	(173.911.772,00)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban	0,00	0,00	-
Ekuitas	158.296.748,33	332.208.520,33	(173.911.772,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	158.296.748,33	332.208.520,33	(173.911.772,00)

(dalam rupiah)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA PERBANDINGAN) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	(%)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)
5	BELANJA	(1,149,183,932.25)	(1,140,199,601.00)	99.22	(2,978,787,310.00)
5.1	BELANJA OPERASI	(1,149,183,932.25)	(1,140,199,601.00)	99.22	(2,978,787,310.00)
5.1.1	Belanja Pegawai	543,965,000.00	541,416,060.00	99.53	848,461,754.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605,218,932.00	598,783,541.00	98.94	2,130,325,556.00
	SURPLUS (DEFISIT)	(1,149,183,932.25)	(1,140,199,601.00)	99.22	(2,978,787,310.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)	(1,149,183,932.25)	(1,140,199,601.00)	99.22	(2,978,787,310.00)

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2019**

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Bantuan Keuangan – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Pendapatan Lainnya – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BEBAN	1.314.555.713,00	3,178,685,119,00	(1.944.240.732,00)	(61.16)
9.1	BEBAN OPERASI	1.314.555.713,00	3,178,685,119,00	(1.944.240.732,00)	(61.16)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	541.416.060,00	848.461.754,00	(307.045.694)	(36,19)
9.1.2	Beban Persediaan	163.789.000,00	377.435.200,00	(213.646.200,00)	(56,60)
9.1.2	Beban Jasa	63.964.560,00	202.147.834,00	(138.506.274,00)	(68,41)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	371.029.981,00	1.550.419.522,00	(1.179.389.541,00)	(76,07)
9.1.3	Beban Bunga	0	0.00	0	0.00
9.1.4	Beban Subsidi	0	0.00	0	0.00
9.1.5	Beban Hibah	0	0.00	0	0.00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0	0.00	0	0.00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	174.356.112,00	199.897.809,00	(105.653.023,00)	(52,85)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0	0.00	0.00	0.00
9.1.9	Beban Lain-lain	0	0.00	0.00	0.00
9.2	BEBAN TRANSFER	0	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0.00	0.00	0.00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0.00	0.00	0.00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0.00	0.00	0.00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	0.00	0.00	0.00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0.00	0.00	0.00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0	0.00	0.00	0.00
9.2.7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0	0.00	0.00	0.00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	0.00	0.00	0.00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	0.00	0.00	0.00
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(1.314.555.713,00)	(3,178,685,119,00)	1.944.240.732,00	(61.16)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
DAN 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2021	PER 31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	332,208,520.33	532,106,333.33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,314,555,713.00)	(3,178,685,119.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	444,340.00	(4.00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	1,140,199,601.00	2,978,787,310.00
EKUITAS AKHIR	158,296,748.33	332,208,520.33

NERACA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021 DAN TAHUN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2021	PER 31 DESEMBER 2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di BLUD	0.00	0.00
Kas di Bendahara FKTP	0.00	0.00
Kas di Bendahara BOS	0.00	0.00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	0.00	0.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00
Penyisihan Piutang	0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	0.00	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	0.00	0.00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Berjangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00
ASET TETAP		
Tanah	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	1,125,886,239.00	1,125,886,239.00
Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	21,246,500.00	21,246,500.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(1,112,002,574.00)	(1,032,799,802.00)
JUMLAH ASET TETAP	35,130,165.00	114,332,937.00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tak Berwujud	378,836,000.00	378,836,000.00
Aset lain-lain	36,350,000.00	36,350,000.00
Tagihan TGR	0.00	0.00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(292,019,416.67)	(197,310,416.67)
JUMLAH ASET LAINNYA	123,166,583.33	217,875,583.33
JUMLAH ASET	158,296,748.33	332,208,520.33
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00

Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
Utang Beban	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0.00	0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		0.00
EKUITAS		
Ekuitas	158,296,748.33	332,208,520.33
JUMLAH EKUITAS	158,296,748.33	332,208,520.33
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	158,296,748.33	332,208,520.33

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

a. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan PD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh PD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan PD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi PD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan PD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan PD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana PD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.

4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi PD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

b. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan PDTahun Anggaran 2021 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2021Nomor8);
11. PeraturanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentangSistem dan ProsedurPengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
12. PeraturanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021Nomor1);
13. PeraturanGubernur Kalimantan Tengah Nomor5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporanserta Monitoring dan EvaluasiHibah dan BantuanSosial(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun2021tentangPerubahanAtasPeraturanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporanserta Monitoring dan EvaluasiHibah dan BantuanSosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2021Nomor 16);
14. PeraturanGubernur Kalimantan Tengah Nomor56Tahun2019TentangKebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2019Nomor56);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2021 Nomor14).

c. SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PD

- A. Profil Organisasi
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD PD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang adadalampencapaian target yang telahditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 2. Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
 - 3. Beban
 - 1. Beban Pegawai
 - 2. Beban Barang dan Jasa
 - 3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

4. Aset
 - a. AsetLancar
 - b. AsetTetap
 - c. AsetLainnya
5. Kewajiban
 - a. KewajibanJangkaPendek
 - b. KewajibanJangkaPanjang
6. Ekuitas Dana
 - a. Ekuitas Dana Lancar
 - b. Ekuitas Dana Investasi
7. PerubahanEkuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

**PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD**

A. PROFIL ORGANISASI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90).

Kedudukan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu unit/Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah di Bidang Organisasi dan Tata Laksana dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 1) Biro Organisasi mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administratif, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Visi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

**“ TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) DALAM PELAYANAN PUBLIK
MELALUI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN RASIONAL.”**

Penjelasan Makna Visi tersebut :

- Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, merupakan salah satu kebijakan dan program Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Aparatur Negara yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
- Administrasi Pemerintahan artinya adalah administrasi yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman yang didukung dengan pemanfaatan teknologi modern dan sistem administrasi modern.
- Efektif, Efisien, dan Rasional artinya ketepatan dalam pembentukan kelembagaan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan visi tersebut Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang profesional dan tangguh dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan;
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- c. Meningkatkan penataan kelembagaan yang hemat struktur kaya fungsi (tepat fungsi dan tepat ukuran);
- d. Meningkatkan pemberdayaan aparatur secara optimal;
- e. Meningkatkan budaya kerja, budaya tertib dan budaya bersih;
- f. Meningkatkan kualitas penyusunan *RoadMap* Reformasi Birokrasi dan mendorong pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi;
- g. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- h. Meningkatkan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- i. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- j. Meningkatkan Kualitas SDM dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik.

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.

3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan daerah Kalimantan Tengah untuk tahun 2016–2021, yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
2. Pemerataan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
4. Stabilitas Ekonomi Daerah;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat;
6. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

8. Pengelolaan industri pariwisata;
9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Kesepuluh prioritas pembangunan daerah tersebut di atas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka menengah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan perkiraan yang dicapai dalam tahun 2019, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2021, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2021 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDSPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, kami tampilkan pencapaian target kinerja Biro Organisasi Tahun 2021 sebagai berikut :

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	SISA DANA	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG	1,149,183,932.00	1,140,199,601.00	8,984,331.25	99.21
4.06.4.06.01.07.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10,000,000.00	9,920,500.00	79.500,00	46.20
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	6,533,000.00	6,477,500.00	55.500,00	99,15
5.2.2.01.04	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	1,545,000.00	1,545,000.00	-	100
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	1,922,000.00	1,898,000.00	24.000,00	98,75
4.06.4.06.01.07.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	564,061,739.25	560,848,420.00	3.213.319,25	99,43
5.2.1.01.01	Honorarium PanitiaPelaksanaKegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100
5.2.2.01.03	Honorarium PengelolaUang dan Barang	157,605,000.00	155,795,000	1,810,000	98,85
5.2.1.02.02	Honorarium PegawaiHonoror/TidakTetap	332,360,000.00	331,621,060.00	738,940.00	99,78
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	14,220,739.00	14,065,000.00	155,739.25	98,90
5.2.2.01.04	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	2,700,000.00	2.685,000.00	15,000.00	99,44
5.2.2.04.01	BelanjaPremiAsuransiKesehatan	11,800,000.00	11,364,560.00	435,440.00	96,31
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	18,376,000.00	18,317,800.00	58,200.00	99,68
4.06.4.06.01.07.01.56	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10,150,000.00	9,972,000	178,000.00	98,25
5.2.2.06.01	BelanjaCetak	4,374,000.00	4,330,000.00	44,000	98.99
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	5,776,000.00	5,642,000.00	134,000.00	97.68
4.06.4.06.01.07.01.18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	21,545,800.00	21,545,800.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	820,000.00	820,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	20,725,800.00	20,725,800.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.01.19	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	172,634,912.00	172,241,000.00	402,912.00	99.77
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	780,000.00	540,000.00	240,000.00	69.23
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	3,038,000	2,974,000.00	64,000.00	97.89
5.2.2. 15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	168,825,912.00	168,727,000.00	98,912.00	99.94
4.06.4.06.01.07.05.78	FORUM SEKRETARIS DAERAH	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
5.2.2.03.09	BelanjaJasaTransaksiKeuangan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.06.53	ASISTENSI PENYUSUNAN LAKIP	30,576,200.00	28,086,200.00	2,490,000	91.86
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	1,379,000.00	1,379,000.00	-	100.00
5.2.2.01.04	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	-	-	-	0.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	2,490,000.00	-	2,490,000.00	0.00
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	480,000.00	480,000.00	-	100.00
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	-	-	-	0.00
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	10,750,000.00	10,750,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	15,477,200.00	15,477,200.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.06.81	PEMAMFAATAN SISTEM INFORMASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS WEB (e-LKIP)	2,135,000.00	1,885,000.00	250,000.00	88.29

5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	2,135,000.00	1,885,000.00	-	88.29
5.2.2.03.06	BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	-	-	-	0.00
5.2.2.03.13	BelanjaJasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	-	-	-	0.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.24.01	EVALUASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH	9,505,500.00	9,505,500.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	252,000.00	252,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.5.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	9,253,500.00	9,253,500.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.24.02	PEMBINAAN DAN ASISTENSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,604,500.00	6,604,500.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	194,500.00	194,500.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	6,410,000.00	6,410,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.24.03	PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	10,656,400.00	10,656,400.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	-	-	-	-
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	10,656,400.00	10,656,400.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.24.04	PENYUSUNAN TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7,566,500.00	7,566,500.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	-	-	-	-
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	7,566,500.00	7,566,500.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.24.05	PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN PERANGKAT DAERAH	25,024,500.00	25,024,500.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	958,500.00	958,500.00	-	100.00
5.2.2.03.34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	7,566,000.00	7,566,000.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.24.07	PENYUSUNAN FORMASI JABATAN	23,475,100.00	23,475,100.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	-	-	-	-
5.2.2.03.34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00

5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	6,975,100.00	6,975,100.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.24.09	PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,295,000.00	18,295,000.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	150,000.00	150,000.00	-	100.00
5.2.2.03.34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.07.03	BelanjaSewaRuangRapat/Pertemuan	-	-	-	-
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	3,125,000.00	3,125,000.00	-	100.00
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	11,220,000.00	11,220,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.24.10	RAPAT PRA RAKOR DAN RAKOR REGIONAL BIDANG ORGANISASI & KEPEGAWAIAN SE KALIMANTAN SESUAI AGENDA TIAP TAHUN	998,000.00	998,000.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	998,000.00	998,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.24.13	PENATAAN UPTD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9,596,300.00	9,596,300.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	367,000.00	367,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	9,229,300.00	9,229,300.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.24.14	PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH	1,599,000.00	1,152,000.00	447,000.00	72.05
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	1,599,000.00	1,152,000.00	447,000.00	72.05
5.2.2.03.34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.24.15	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI KALTENG	32,603,500.00	32,603,500.00	-	100.00
5.2.1.01.01	Honorarium PanitiaPelaksanaKegiatan	-	-	-	-
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	4,813,500.00	4,813,500.00	-	100.00
5.2.2.01.10	BelanjaBahanDekorasi	-	-	-	-
5.2.2.01.13	BelanjaBaliho	-	-	-	-
5.2.2.03.34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.07.02	BelanjaSewa Gedung/Kantor/Tempat	-	-	-	-
5.2.2.07.03	BelanjaSewaRuangRapat/Pertemuan	-	-	-	-

5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	25,540,000.00	25,540,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.24.19	EVALUASI JABATAN	20,136,500.00	20,136,500.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	3,640,000.00	3,640,000.00	-	100.00
5.2.2.03.34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	16,496,500.00	16,496,500.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.25.02	PENGELOLAAN ADMINISTRASI LHKPN	2,755,800.00	2,755,800.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	1,759,000.00	1,759,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	996,800.00	996,800.00	-	100.00
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.25.03	PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA	1,450,000.00	1,450,000.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	-	-	-	-
5.2.2.01.04	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	180,000.00	180,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	990,000.00	990,000.00	-	100.00
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	280,000.00	280,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.25.08	PENYUSUNAN RENCANA KERJA, RENCANA ANGGARAN DAN PELAPORAN BIRO	96,330,000.00	94,831,400.00	1,498,600.00	98.44
5.2.1.01.01	Honorarium PanitiaPelaksanaKegiatan	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	17,440,000.00	16,993,000	447,000.00	97.44
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5,400,000.00	5,250,000.00	150,000.00	97.22
5.2.2.06.01	BelanjaCetak	15,600,000.00	15,350,000.00	250,000.00	98.40
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	30,890,000.00	30,238,400.00	651,600.00	97.89
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.25.15	RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG ORGANISASI SE KALIMANTAN TENGAH	938,000.00	938,000.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	938,000.00	938,000.00	-	100.00
5.2.2.01.13	BelanjaBalihoo	-	-	-	-
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.26.01	KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK	4,554,000.00	4,129,000.00	-	90.67
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	994,000.00	569,000.00	425,000.00	57.24
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-

5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	3,560,000.00	3,560,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
4.06.4.06.01.07.26.05	EVALUASI TATA NASKAH DINAS	19,473,200.00	19,473,200.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	926,000.00	926,000.00	-	100.00
5.2.2.01.04	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	120,000.00	120,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	870,000.00	870,000.00	-	100.00
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	17,557,200.00	17,557,200.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.26.18	ASISTENSI STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)	19,019,481.00	19,019,481.00	-	100.00
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	990,000.00	990,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	-	-	-	-
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	15,829,481.00	15,829,481.00	-	100.00
4.06.4.06.01.07.26.20	ASISTENSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	7,490,000.00	7,490,000.00	-	100.00
5.2.1.01.01	Honorarium PanitiaPelaksanaKegiatan	-	-	-	-
5.2.2.01.01	BelanjaAlatTulis Kantor	-	-	-	-
5.2.2.01.04	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	-	-	-	-
5.2.2.01.13	BelanjaBaliho	-	-	-	-
5.2.2.03.34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
5.2.2.06.02	BelanjaPenggandaan	-	-	-	-
5.2.2.06.03	BelanjaPenjilidan	-	-	-	-
5.2.2.07.02	BelanjaSewa Gedung/Kantor/Tempat	-	-	-	-
5.2.2.07.03	BelanjaSewaRuangRapat/Pertemuan	-	-	-	-
5.2.2.11.02	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	-	-	-	-
5.2.2.15.01	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	7,490,000.00	7,490,000.00	-	100.00
5.2.2.15.02	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah	-	-	-	-
JUMLAH		1,149,183,932.25	1,140,199,601.00	8,984,331.25	99.22

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagai gambaran dan bahanevaluasipencapaiantargetkinerjakeuangan, data mengenaiikhtisarrealisasipencapaian target kinerjakeuanganTahun2021dapatkamisajikandalamtabelberikut :

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAHTAHUN 2021

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN			INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)			
				TARGET 2021 (%)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021		NARASI	SATUAN (Unit)	S (%)	R (%)
				(%)	(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	4.06.4.06.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	778.401.451,00	100%	774.527.720,00	99,50	-	-	99,50	100%
	4.06.4.06.01.07.01.01	PenyediaanJasa Surat Menyurat	10.000.000,00	100%	9.920.500,00	99,21	-	Surat	99,21	100%
	4.06.4.06.01.07.01.07	PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan	564.061.739,00	100%	560.848.420,00	99,43	-	Orang	99,43	100%
	4.06.4.06.01.07.01.56	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	10.150.000,00	100%	9.972.000,00	98,25	-	Lembar	98,25	100%
	4.06.4.06.01.07.01.18	Rapat-Rapat dan KonsultasikeLuar Daerah	21.545.800,00	100%	21.545.800,00	100,00	-	Rapat	100,00	100%
	4.06.4.06.01.07.01.19	Rapat-Rapat dan KonsultasikeDalam Daerah	172.643.912,00	100%	172.241.000,00	99,77	-	Rapat	99,77	100%
II	4.06.4.06.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100,00	-	-	100,00	100%
	4.06.4.06.01.07.05.78	Forum Sekretaris Daerah	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100,00	-	Orang	100,00	100%
III	4.06.4.06.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.711.200,00	100%	29.971.200,00	91,62	-	-	91,62	100%
	4.06.4.06.01.06.53	AsistensiPenyusunan LAKIP	30.576.200,00	100%	28.086.200,00	91,86	-	Orang	91,86	100%
	4.06.4.06.01.06.81	PemanfaatanSistemInformasi LaporanKinerjaInstansiPemerintahBerbasis Web (e-LKIP)	2.135.000,00	100%	1.885.000,00	88,29	-	Orang	88,29	100%
IV	4.06.4.06.01.07.24	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	166.060.800,00	100%	165.613.800,00	99,73	-	-	99,73	100%
	4.06.4.06.01.24.01	EvaluasiPerangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	9.505.500,00	100%	9.505.500,00	100,00	-	Kab./Kota	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.02	Pembinaan dan AsistensiPerangkat Daerah Kabupaten/Kota	6.604.500,00	100%	6.604.500,00	100,00	-	Kab./Kota	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.03	PenataanKelembagaanPerangkat Daerah	10.656.400,00	100%	10.656.400,00	100,00	-	Provinsi	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.04	PenyusunanTupoksiOrganisasiPerangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	7.566.500,00	100%	7.566.500,00	100,00	-	PD	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.05	PelaksanaanAnalisisJabatanPerangkat Daerah	25.024.500,00	100%	25.024.500,00	100,00	-	PD	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.07	PenyusunanFormasiJabatan	23.475.100,00	100%	23.475.100,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.09	PenataanKelembagaanOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten/Kota	18.295.000,00	100%	18.295.000,00	100,00	-	Kab./Kota	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.10	RapatPraRakor dan Rakor Regional BidangOrganisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Sesuai Agenda TiapTahun	998.000,00	100%	998.000,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.13	Penataan UPTD Provinsi Kalimantan Tengah	9.596.300,00	100%	9.596.300,00	100,00	-	Provinsi	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.14	PelaksanaanAnalisis Beban KerjaPerangkat Daerah	1.599.000,00	100%	1.152.000,00	72,05	-	Dokumen	72,05	100%
	4.06.4.06.01.24.15	PelaksanaanReformasiBirokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah	32.603.500,00	100%	32.603.500,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%
	4.06.4.06.01.24.19	EvaluasiJabatan	20.136.500,00	100%	20.136.500,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%

V	4.06.4.06.01.07.25	PROGRAM KEPEMERINTAH YANG BAIK DAN PEMBERANTASAN KKN	101.473.800,00	100%	99.975.200,00	98,52	-	-	98,52	100%
	4.06.4.06.01.25.02	Pengelolaan Administrasi LHKPN	2.755.800,00	100%	2.755.800,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%
	4.06.4.06.01.25.03	Penyusunan Perjanjian Kerja	1.450.000,00	100%	1.450.000,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%
	4.06.4.06.01.25.08	Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Anggaran, dan Pelaporan Biro	96.330.000,00	100%	94.831.400,00	98,44	-	Dokumen	98,44	100%
	4.06.4.06.01.25.15	Rapat Koordinasi Teknis Program dan Kegiatan Bidang Organisasi se Kalimantan Tengah	938.000,00	100%	938.000,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%
VI	4.06.4.06.01.07.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	50.536.681,00	100%	50.111.681,00	99,16	-	-	99,16	100%
	4.06.4.06.01.26.01	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	4.554.000,00	100%	4.129.000,00	90,67	-	Kab./Kota	90,67	100%
	4.06.4.06.01.26.05	Evaluasi Tata Naskah Dinas	19.473.200,00	100%	19.473.200,00	100,00	-	Dokumen	100,00	100%
	4.06.4.06.01.26.18	Asistensi Standar Pelayanan Publik (SPP)	19.019.481,00	100%	19.019.481,00	100,00	-	Orang	100,00	100%
	4.06.4.06.01.26.20	Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP)	7.490.000,00	100%	7.490.000,00	100,00	-	Orang	100,00	100%
BELANJA LANGSUNG			1.149.183.932,00	100%	1.140.199.601,00	99,22	-		99,22	100%

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara umum dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Disadari bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Pada Semester II Tahun Anggaran 2021 ini yang menjadi kendala yaitu karena adanya wabah pandemi *Covid-19* sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan atau pergeseran anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1 Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar Basis Akrual.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

- b. Pendapatan diakui pada saat telah diperoleh (*earned*) dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

2 Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

1. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayarkan sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiv tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Nilai perolehan lebih rendah dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3 Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4 Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5 Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6 Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7 Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8 Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diidentifikasi dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah:

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana

a. Aset

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1 Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

a. Kas di Kas Daerah

1.a.1 Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.a.2 Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.a.3 Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

(01) Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

(02) Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

c. Piutang

(01) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

(02) Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

(03) Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

(04) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

(05) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:

- Klarifikasi piutang menurut umur
- Klarifikasi piutang menurut debitur

d. Persediaan Bahan Pakai Habis / Material

- 1 Persediaan Bahan Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 2 Persediaan Bahan Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3 Persediaan Bahan Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
 - a) Persediaan Barang Pakai Habis/Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
 - b) Persediaan Barang Pakai Habis/Material dinilai berdasarkan:
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
 - c) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

2 Investasi Jangka Panjang

- Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:

- (01) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
- (02) Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
 - Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
 - Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
 - Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
 - Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (*Lower Cost or Market*).

3 Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.

b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

c) Aset tetap antara lain terdiri dari :

(02) Tanah

(03) Jalan dan Jembatan

(04) Bangunan Air (irigasi)

(05) Instalasi

(06) Jaringan

(07) Bangunan Gedung

(08) Bangunan Monumen

(09) Alat-Alat Besar

(10) Alat Angkutan

(11) Alat Bengkel dan Alat Ukur

(12) Alat Pertanian

(13) Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

(14) Alat Studio dan Alat Komunikasi

(15) Alat-Alat Kedokteran

(16) Alat-Alat Laboratorium

(17) Buku dan Perpustakaan

(18) Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

(19) Hewan Ternak dan Tumbuhan

(20) Alat Keamanan

d) Penjelasan Akun Aset Tetap

i. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah

sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

ii. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

iii. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

iv. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

v. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

vi. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

vii. Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

viii. Alat-alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

ix. Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

- x. Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.
- xi. Alat Pertanian
Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
- xii. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.
- xiii. Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.
- xiv. Alat-alat Kedokteran
Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.
- xv. Alat-alat Laboratorium
Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.
- xvi. Buku dan Perpustakaan
Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.
- xvii. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

xviii. Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

xix. Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

d) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

e) Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (*maintenance*), perbaikan (*repairs*), penambahan (*additions*), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
 - a. Pemeliharaan (*maintenance*) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada

periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

- b. Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
- c. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
- d. Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.
- e. Penggantian utama (*replacements*) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

f) Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk

melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

g) Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

h) Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

4 Dana Cadangan

- (01) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- (02) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- (03) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

5 Aset Lainnya

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari:

- (01) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(02) Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi: *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

(03) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

(04) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

(05) Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

b. Kewajiban

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

Kewajiban ini meliputi:

(01) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.

(02) Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal. Akun ini pada umumnya muncul di Satuan Organisasi pengguna anggaran karena pengguna anggaran lah yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Oleh karena itu, inventarisasi utang kepada pihak ketiga dilakukan di setiap satuannya.

(03) Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memb

aya beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan, utang obligasi. Akun ini dikelola oleh Satuan Organisasi pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersama dengan inventarisasi utang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal penyusunan neraca awal.

- (04) Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun, potongan PPh pasal 21 dan PFK lainnya. Bagi pemerintah daerah PFK antaralain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak pusat.
- (05) Utang Belanja merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah dibebankan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- (06) Utang Pajak merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- (07) Pendapatan Diterima di Muka merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- (08) Utang Lain-lain merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- (01) Utang dalam negeri perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal eraca. Akun ini pada umumnya ada di Satuan Organisasi pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, inventarisasi utang dalam negeri sektor perbankan dilakukan di Satuan Organisasi pengelola keuangan daerah.
- (02) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri Perbankan dan Utang Dalam Negeri Obligasi, misalnya Utang Kemitraan.

c. Ekuitas Dana

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari: Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

1) Ekuitas Dana Lancar

- a) Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- b) Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- c) Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

d) Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
- b) Cadangan untuk piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
- c) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
- d) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran.
- e) Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
- f) Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

2) **Ekuitas Dana Investasi**

- (01) Ekuitas Dana
Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- (02) Ekuitas Dana Investasi diakui pada
akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang
dibelis selama periode berjalan.

3) Ekuitas Dana Cadangan

- a. Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- b. Ekuitas Dana Cadang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer ke dalam periode berjalan.
- c. Saldo rekening Ekuitas Dana Cadang diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atas dari dana cadangan.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya:
 - (1) Peruntukan, batasan dan jenis investasi dan cadangan.
 - (2) Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan PD kepada para pemakai/*stakeholders*.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD PD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

1. PENDAPATAN Rp. 0,00,-

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan retribusi sampai Semester I Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.0,00,- atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan pada Biro Organisasi pada Tahun Anggaran 2021.

2. BELANJA Rp. 1,140,199,601.00,-

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Daerah Semester II Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1,149,183,932.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,140,199,601.00,- atau 99,22 % dan sisa sebesar Rp.8,984,331.25 atau 0.78 %.

a) Belanja Operasi **Rp. 1,140,199,601.00,-**

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja Operasi Semester II Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1,149,183,932.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,140,199,601.00,- atau 99,22 % dan sisa sebesar Rp.8,984,331.25 atau 0.78 %.

Belanja Operasi pada Biro Organisasi terdistribusi:

a.1. Belanja Pegawai **Rp. 541,416,060.00,-**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 543,965,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 541,416,060.00,- atau 99.53 % dan sisa sebesar Rp. 2,548,940.00,- atau 0.46%.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Belanja Honorarium PNS	211.605.000,00	209.795.000,00	1.810.000,00	99,14
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	157.605.000,00	155.795.000,00	1.810.000,00	98,85
Belanja Honorarium Non PNS	332.360.000,00	331.621.060,00	738.940,00	99,78
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	332.360.000,00	331.621.060,00	738.940,00	99,78
JUMLAH BELANJA PEGAWAI	543.965.000,00	541.416.060,00	2.548.940,00	99,53

a.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp. 598,783,541.00,-**

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dan Jasa Semester II Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.605,218,932.25,- dengan realisasi sebesar Rp.598,783,541.00,- atau 98,94% dan sisa sebesar Rp. 6,435,391.25,- atau 1,06 %.

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2020 (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	71.832.239,25	69.647.000,00	2.185.239,25	96,96
Belanja Alat Tulis Kantor	61.887.239,25	59.867.000,00	2.020.239,25	96,74
Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.945.000,00	9.780.000,00	165.000,00	98,34
Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Ballho	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Jasa Kantor	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Premi Asuransi	11.800.000,00	11.364.560,00	435.440,00	96,31
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11.800.000,00	11.364.560,00	435.440,00	96,31
Belanja Cetak dan Penggandaan	88.332.800,00	84.617.000,00	3.715.800,00	95,79
Belanja Cetak	19.974.000,00	19.680.000,00	294.000,00	98,53
Belanja Penggandaan	67.598.800,00	64.177.000,00	3.421.800,00	94,94
Belanja Penjilidan	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	371.128.893,00	371.029.981,00	98.912,00	99,97
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	233.795.912,00	233.697.000,00	98.912,00	99,96
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.332.981,00	137.332.981,00	0,00	100,00
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	605.218.932,25	598.783.541,00	6.435.391,25	98,94

b. Belanja Modal Rp. 0.00,-

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 0.00,- atau tidak dianggarkan.

b.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0.00,-

Belanja Peralatan dan Mesin Semester I Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 0.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 0.00,- atau 0 %.

b.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 0.00,-

Belanja Aset Tetap Lainnya Semester I Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 0.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 0.00,- atau 0 %.

3. BEBAN Rp.**1,314,555,713.00,-**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1,314,555,713.00,-

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

URAIAN	BEBAN PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
Beban Pegawai – LO	541,416,060.00
Beban Honorarium PNS – LO	209,795,000.00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – LO	54,000,000.00
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang – LO	155,795,000.00
Beban Honorarium Non PNS – LO	331,621,060.00
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap – LO	331,621,060.00
Beban Barang dan Jasa	598,783,541.00
Beban Bahan Pakai Habis	69,887,239.25
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	59,867,000.00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9,780,000.00
Beban Jasa Kantor	52,600,000.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,600,000.00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	20,000,000.00
Beban Jasa Premi Asuransi	11,364,560.00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	11,364,560.00
Beban Cetak dan Penggandaan	84,617,000.00
Beban Cetak	19,680,000.00
Beban Penggandaan	64,177,000.00
Beban Penjilidan	760,000.00
Beban Makanan dan Minuman	9,525,000.00
Beban Makanan dan Minuman	9,525,000.00
Beban Perjalanan Dinas	371,029,981.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	233,697,000.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	137,332,981.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	174,356,112.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79,647,112.00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	69,900,910.00
Beban Penyusutan Alat Kantor	515,583.00
Beban Penyusutan Alat Rumah tangga	58,333.00
Beban Penyusutan Komputer	0.00
Beban Penyusutan Alat Studio	237,917.00
Beban Penyusutan Komputer Unit	5,085,936.00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	3,848,433.00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	94,709,000.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	94,709,000.00
JUMLAH BEBAN	1,314,555,713.00

a. Beban Pegawai- LO**Rp. 541,416,060.00,-**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 541,416,060.00,-

Beban Pegawai terdiri atas:

a.1. Beban Honorarium PNS - LO Rp. 209,795,000.00,-

Jumlah belanja honorarium PNS pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 209,795,000.00,-

sedangkan beban honorarium PNS sebesar Rp. 209,795,000.00,-

Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-.

Rincian Beban Honorarium PNS adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan- LO	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	-
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang- LO	155,795,000.00	155,795,000.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN HONORARIUM PNS	209,795,000.00	209,795,000.00	0.00	-

a.2. Beban Honorarium Non PNS - LO Rp. 331,621,060.00,-

Jumlah belanja honorarium non PNS pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2021 adalah sebesar

Rp. 331,621,060.00,- sedangkan beban honorarium non PNS sebesar

Rp. 331,621,060.00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban

adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Honorarium Non PNS adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tahap	331,621,060.00	331,621,060.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN HONORARIUM NON PNS	331,621,060.00	331,621,060.00	0.00	-

b. Beban Barang dan Jasa Rp. 598,783,541.00,-

Beban Barang dan Jasa adalah beban atas adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual

kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 598,783,541.00,-
Beban Barang dan Jasa terdiri atas:

b.1. Beban Bahan Pakai Habis Rp.69,647,000.00,-

Beban bahan pakai habis adalah beban berupa konsumsi barang pakai habis (persediaan). Beban barang pakai habis dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban bahan pakai habis dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah persediaan bahan pakai habis pada awal periode per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,- dan jumlah belanja bahan pakai habis pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 69,647,000.00,-sedangkan beban bahan pakai habis sebesar Rp.69,647,000.00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Bahan Pakai Habis adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
1	2	3	4 (3-2)	5
Beban AlatTulis Kantor	59,867,000.00	59,867,000.00	0.00	-
Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	69,647,000.00	69,647,000.00	0.00	-

b.2. Beban Jasa Kantor Rp. 52,600,000.00,-

Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Jumlah belanja jasa kantor pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.52,600,000.00,- sedangkan beban jasa sebesar Rp.52,600,000.00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	-
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN JASA KANTOR	52,600,000.00	52,600,000.00	0.00	-

b.3. Beban Premi Asuransi Rp.11,364,560.00,-

Beban premi asuransi adalah beban pembayaran premi asuransi kesehatan. Jumlah belanja cetak dan penggandaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.11,364,560.00,-sedangkan beban premi asuransi sebesar Rp.11,364,560.00,-Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11,364,560.00	11,364,560.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN PREMI ASURANSI	11,364,560.00	11,364,560.00	0.00	-

b.4. Beban Cetak dan Penggandaan Rp.84,617,000.00,-

Beban cetak dan penggandaan adalah beban berupa konsumsi jasa cetak, penggandaan, dan penjilidan selama periode berjalan. Jumlah belanja cetak dan penggandaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.84,617,000.00,- sedangkan beban cetak dan penggandaan sebesar Rp.84,617,000.00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Cetak	19,680,000.00	19,680,000.00	0.00	-
Beban Penggandaan	64,177,000.00	64,177,000.00	0.00	-
Beban Penjilidan	760,000.00	760,000.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN	84,617,000.00	84,617,000.00	0.00	-

b.5. Beban Makanan dan Minuman **Rp.9,525,000.00,-**

Beban makanan dan minuman adalah beban berupa konsumsi makanan dan minuman selama periode berjalan. Jumlah belanja makanan dan minuman pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.9,525,000.00,- sedangkan beban makanan dan minuman sebesar Rp.9,525,000.00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp.0.00,-

Rincian Beban Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Makanan dan Minuman Rapat	9,525,000.00	9,525,000.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN	9,525,000.00	9,525,000.00	0.00	-

b.6. Beban Perjalanan Dinas **Rp. 371,029,981.00,-**

Beban perjalanan dinas adalah beban berupa perjalanan dinas selama periode berjalan. Beban perjalanan dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah belanja perjalanan dinas pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.371,029,981.00,- sedangkan beban perjalanan dinas sebesar Rp. 371,029,981.00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	233,697,000.00	233,697,000.00	0.00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	137,332,981.00	137,332,981.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS	371,029,981.00	371,029,981.00	0.00	-

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp. 174,356,112.00,-**

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur masa manfaatnya. Jumlah

beban penyusutan dan amortisasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 174,356,112.00,-

Beban penyusutan dan amortisasi terdiri atas:

c.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 79,647,112.00

Beban penyusutan peralatan dan mesin adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu peralatan dan mesin selama umur masa manfaatnya. Jumlah beban penyusutan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 79,647,112.00,-

Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

URAIAN	PENYUSUTAN		BEBAN PENYUSUTAN	KET.
	SEMESTER I	SEMESTER II		
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	37,381,750.00	32,519,160.00	69,900,910.00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	325,916.00	248,000.00	573,916.00	-
Beban Penyusutan Komputer	8,934,369.00	0.00	8,934,369.00	-
Beban Penyusutan Alat Studio	237,917.00	0.00	237,917.00	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	46,879,952.00	32,767,160.00	79,647,112.00	-

c.2. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp. 94,709,050.00,-

Beban amortisasi aset tak berwujud adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari aset tak berwujud selama umur masa manfaatnya. Jumlah beban amortisasi aset tak berwujud pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 94,709,000.00,-

Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

URAIAN	PENYUSUTAN		BEBAN	KET.
	SEMESTER I	SEMESTER II		
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	47,354,500.00	47,354,500.00	94,709,000.00	-
BEBAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	47,354,500.00	47,354,500.00	94,709,000.00	-

4. ASET

Rp. 158,296,748.33

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri atas:

1. Aset Lancar

Rp. 0.00,-

Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam waktu dekat, biasanya satu tahun. Contoh aset lancar antara lain kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan, dan beban dibayar dimuka.

Aset lancar terdiri atas:

a. Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

b. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran pembantu per 31 Desember 2021 adalah sebesarRp. 0.00,-

0,00-.

c. Piutang

Lain-lain

Rp.

0,00

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

d.

Persediaan

Rp.

27.890.525,00

Jumlahsaldopersediaanbarangpakaihabis yang ada pada seluruh unit kerjaper 31 Desember 2021 sebesarRp. 0.00,-

Rincian Persediaanadalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021(Rp)	TOTAL PERSEDIAAN PER 31 Desember 2021(Rp)	PERSEDIAANTE RPAKAI PER 31 Desember 2021(Rp)	SALDO PERSEDIAN PER 31 Desember 2021 (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
PersediaanAlatTulis Kantor	0.00	59,867,000.00	59,867,000.00	0.00	-
PersediaanPerangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0.00	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	-
PersediaanCetak	0.00	19,680,000.00	19,680,000.00	0.00	-
PersediaanPenggandaan	0.00	64,177,000.00	64,177,000.00	0.00	-
PersediaanPenjilidan	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	-
PersediaanMakanan dan MinumanRapat	0.00	9,525,000.00	9,525,000.00	0.00	-
JUMLAH BEBAN BARANG PAKAI HABIS	0.00	163,789,000.00	163,789,000.00	0.00	-

2. Aset Tetap

Rp. 35,130,165.00,-

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 Rp. 1,147,132,739.00 dikurangi nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.(1,112,002,574.00,-) adalah sebesar Rp. 35,130,165.00,-

Perbandingan rincian Aset Tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

JENIS ASET	SALDO PER JUNI 2021(Rp)	SALDO PER DESEMBER 2021(Rp)	PENAMBAHAN ASET PER JUNI 2021 (Rp)		SALDO PER 31 Desember 2021 (Rp)
			TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6
Tanah	-	0.00	0.00	0.00	-
Peralatan dan Mesin	1,125,886,239.00	1,125,886,239.00	0.00	0.00	1,125,886,239.00
Gedung dan Bangunan	-	0.00	0.00	0.00	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	0.00	0.00	0.00	-
AsetTetapLainnya	21,246,500.00	21,246,500.00	0.00	0.00	21,246,500.00
KonstruksiDalamPengerjaan	-	0.00	0.00	0.00	-
Akumulasi Penyusutan	(982,491,802.00)	(1,112,002,574.00)	(46,890,286.00)	0.00	(1,112,002,574.00)
JUMLAH ASET	164,640,937.00	114,332,945.00	(129,510,772.00)	0.00	(35,130,165.00)

a. Tanah **Rp. 0.00,-**

Tanah yang dimiliki Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

b. Peralatan dan Mesin **Rp.1,125,886,239.00,-**

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dikurangi nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1,125,886,239.00,-

Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

NAMA BARANG INVENTARIS	SALDO PER 30 JUNI 2019 (Rp)	MUTASI 2021		SALDO PER 31 Desember 2021 (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Alat Angkutan Darat Bermotor	539,048,342.00	0.00	0.00	539,048,342.00
Alat Kantor	55,530,250.00	0.00	0.00	55,530,250.00
Alat Rumah Tangga	11,850,000.00	0.00	0.00	11,850,000.00
Komputer	444,460,647.00	0.00	0.00	444,460,647.00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00
Alat Studio	60,579,000.00	0.00	0.00	60,579,000.00
Alat Komunikasi	10,468,000.00	0.00	0.00	10,468,000.00
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	1,125,886,239.00,-	0.00	0.00	1,125,886,239.00,-

c. Gedung dan Bangunan **Rp. 0.00,-**

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Rp. 0.00,-**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

e. Aset Tetap Lainnya **Rp. 21,246,500.00,-**

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 21,246,500.00,- dan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021

adalah sebesar Rp. 21,246,500.00,- Tidak ada penambahan nilai aset tetap lainnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

NAMA BARANG INVETARIS	SALDO PER 30 JUNI 2019(Rp)	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2021(Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
BukuUmum	12,085,900.00	0.00	0.00	12,085,900.00
BukuIlmuSosial	7,173,800.00	0.00	0.00	7,173,800.00
BukuIlmuPengetahuanPraktis	1,986,800.00	0.00	0.00	1,986,800.00
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA	21,246,500.00	0.00	0.00	21,246,500.00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0.00,-

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

g. Akumulasi Penyusutan Rp. (1,112,002,574.00,-)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Juni 2021 adalah sebesar Rp. (982,491,802.00,-) sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (1,112,002,574.00,-)

Perbandingan rincian Akumulasi Penyusutan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

JENIS PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 30 JUNI 2021 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	PENYUSUTAN 2021		AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 Desember 2021 (Rp)
			SEMESTER I (Rp)	SEMESTER II (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan	(342,390,444.00)	(455,470,433.00)	(37,381,750.00)	(32,519,160.00)	(525,371,343.00)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor	(53,014,750.00)	(55,530,250.00)	(325,916.00)	(248,000.00)	(92,713,584.00)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Rumah Tangga	(11,850,000.00)	(11,850,000.00)	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Komputer	(390,495,989.00)	(435,267,944.00)	(8,934,369.00)	0.00	(437,005,647.00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	(3,950,000.00)	(3,950,000.00)	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(48,675,367.00)	(60,263,167.00)	(237,917.00)	0.00	(56,912,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(10,172,800.00)	(10,468,000.00)	0.00	0.00	0.00
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	(982,491,802.00)	(1,032,799,794.00)	(46,890,286.00)	0.00	(1,112,002,574.00)

3. Aset Lainnya

Rp. 123,166,583.33,-

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD adalah sebesar Rp. 123,166,583.33,- yang terdiri dari aset tak berwujud sebesar Rp. 378,836,000.00,- dan aset lain-lain sebesar Rp. 36,350,000.00,- serta akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp. (292,019,416.67,-)

- a. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai fisik seperti *goodwill*, hak paten, royalti, *software*, dan sebagainya. Nilai aset tak berwujud aset tak berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 378,836,000.00,-

Perbandingan rincian Aset Tak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut:

JENIS ASET	SALDO PER 30 JUNI 2019 (Rp)	PENAMBAHAN 2021		SALDO PER 31 Desember 2021 (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
<i>Software</i>	378,836,000.00	0.00	0.00	378,836,000.00
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD	378,836,000.00	0.00	0.00	378,836,000.00

- b. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 106,337,984.00,- dikurangi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp. (69,987,984.00) sehingga nilai buku per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 36,350,000.00,-

Perbandingan rincian Aset Lain-lain, disajikan sebagai berikut:

JENIS ASET	SALDO PER 30 JUNI 2019 (Rp)	SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	MUTASI		SALDO PER 31 Desember 2021 (Rp)
			TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Rusak Berat (KIB B)	67,837,984.00	111,695,463.00	0.00	0.00	67,837,984.00
Tidak diketahui keberadaannya	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00	38,500,000.00
TOTAL ASET	106,337,984.00	106,337,984.00	0.00	0.00	106,337,984.00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat (KIB B)	(31,487,984.00)	(31,487,984.00)	0.00	0.00	(31,487,984.00)
Akumulasi Penyusutan Barang Tidak Diketahui Keberadaannya	(38,500,000.00)	(38,500,000.00)	0.00	0.00	(38,500,000.00)
TOTAL AKUMULASI	(69,987,984.00)	(69,987,984.00)	0.00	0.00	(69,987,984.00)

JUMLAH ASET LAIN-LAIN	36,350,000.00	36,350,000.00	0.00	0.00	36,350,000.00

Nilai asset lainnya sebesar Rp. 36,350,000.00,- merupakan nilai asset lainnya berupa buku yang kondisinya rusak berat. Berdasarkan kebijakan penyusutan aset yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014, asset berupa buku dan kepustakaan tidak bias disusutkan karena mempunyai masa manfaat 0 tahun sehingga per 31 Desember 2021 tidak ada penambahan nilai akumulasi penyusutan asset lainnya.

- c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,- sedangkan nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (292,019,416.67,-)

Perbandingan rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut:

JENIS ASET	SALDO PER 30 JUNI 2019 (Rp)	SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	PENAMBAHAN 2021		SALDO PER 31 Desember 2021 (Rp)
			SEMESTER I (Rp)	SEMESTER II (Rp)	
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(149,955,916.67)	(197,310,416.67)	(47,354,500.00)	(47,354,500.00)	(292,019,416.67)
JUMLAH AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	(149,955,916.67)	(197,310,416.67)	(47,354,500.00)	(47,354,500.00)	(292,019,416.67)

Selain ketiga jenis aset di atas, juga terdapat aset pada SKPD yang disebut aset ekstrakomptabel. Aset Ekstrakomptabel adalah aset yang harga perolehannya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi. Nilai aset ekstrakomptabel tidak disajikan dalam neraca. Nilai aset ekstrakomptabel pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2,079,995.00,- dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2,079,995.00,- Tidak ada penambahan nilai asset ekstrakomptabel.

Rincian Aset Ekstrakomptabel, disajikan sebagai berikut:

JENIS ASET	SALDO PER 30 JUNI 2019 (Rp)	MUTASI		SALDO 31 Desember 2021 (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Baik	0.00	0.00	0.00	0.00

Rusak Berat	644,999.00	0.00	0.00	644,999.00
Tidak diketahuikeberadaanya	1,434,996.00	0.00	0.00	1,434,996.00
JUMLAH ASET EKSTRAKOMPTABEL	2,079,995.00	0.00	0.00	2,079,995.00

5. KEWAJIBAN

Rp. 0.00,-

Kewajiban terdiri atas:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0.00,-

6. PERUBAHAN EKUITAS

Rp. 158,296,748.33,-

Perubahan Ekuitas merupakan nilai ekuitas awal dan surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi ekuitas lainnya).

a. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada awal Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 332,208,520.33,-

b. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah defisit LO untuk per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (1,314,555,713.00,-)

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar akibat adanya koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 444,340.00,-

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan merupakan akun RK-PPKD pada SKPD. Akun tersebut menampung transaksi timbal balik antara SKPD dengan PPKD. Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1,140,199,601.00,-

e. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 158.296,748.33,-

Rincian Nilai Ekuitas pada akhir periode per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	EKUITAS AWAL (Rp)	SURPLUS (DEFISIT) LO (Rp)	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR (Rp)	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN (Rp)	EKUITAS AKHIR (Rp)
Perubahan Ekuitas	332,208,520.33	(1,314,555,713.00,-)	444,340.00	1,140,199,601.00	158,296,748.33
JUMLAH EKUITAS	332,208,520.33	(1,314,555,713.00,-)	444,340.00	1,140,199,601.00	158,296,748.33

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

-

b. REKENING PEMERINTAH

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki Rekening Bank untuk penarikan anggaran/kas dilakukan secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun Anggaran 2021, disampaikan hal-hal berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun Anggaran 2021.
4. Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun Anggaran 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *output* Aplikasi SIMDA Keuangan
2. Laporan Operasional *output* Aplikasi SIMDA Keuangan
3. Laporan Perubahan Ekuitas *output* Aplikasi SIMDA Keuangan
4. Neraca *output* Aplikasi SIMDA Keuangan
5. Daftar Saldo Buku Besar *output* Aplikasi SIMDA Keuangan
6. SPJ Fungsional Per 31 Desember 2021
7. Rekapitulasi SP2D (UP/GU/TU/LS/Nihil) Per 31 Desember 2021
8. BAPKas Per 31 Desember 2021
9. Rekonsiliasi Keuangan Per 31 Desember 2021
10. Rekonsiliasi Aset Per 31 Desember 2021
11. Rekonsiliasi Persediaan Per 31 Desember 2021
12. BAP *Stock Opname* Per 31 Desember 2021
13. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F) Per 31 Desember 2021
14. Daftar Aset Lainnya Per 31 Desember 2021
15. Daftar Aset *Extra Comptable* Per 31 Desember 2021
16. Daftar Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021
17. Daftar Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021